



DINAMIKA POLITIK ISLAM DI ERA GLOBALISASI: TANTANGAN MASA DEPAN

Amanda Laila Gustiana¹ Diva Maharani² Navysha Putri Julia³ Ni Nyoman Fitri

Mawardah⁴ Raissa Auliya Sharfina Irawan⁵ Arif Hidayat⁶

Universitas Pendidikan Indonesia (Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini)

Amandalaila@upi.edu¹ / divarani@upi.edu² / navyshapi@upi.edu³ / ninyomanfitri27@upi.edu⁴ /
raissaauliya16@upi.edu⁵ / arif.hidayat@upi.edu⁶

Abstract:

The dynamics of Islamic politics in the era of globalization have become increasingly relevant amid worldwide social, economic, and technological changes. Globalization influences Islamic political practices at both local and global levels, particularly through technological penetration and ideological exchange. This article analyzes the impact of globalization on the development of Islamic politics in Indonesia post-2016, including challenges of moderation-radicalism polarization and responses from domestic political actors. The research method employs a qualitative literature study using recent sources (2018–2024) such as journals, books, and reports. The findings indicate that globalization accelerates the exchange of Islamic-Western values, triggering polarization between modernization and conservatism. On one hand, globalization fosters cross-cultural integration; on the other, it sparks resistance to preserve Islamic identity. This article also examines the strategic responses of Islamic political actors, such as political parties and social movements, in addressing these challenges—ranging from adaptation to rejection. The original contribution of this article lies in its analysis of contemporary phenomena like the 212 Movement and the government's deradicalization policies post-dissolution of HTI (2017). The conclusion emphasizes that the complex interaction between tradition and modernity in Indonesian Islamic politics requires contextual, inclusive, and locally-globally informed policy approaches.

Keywords: Globalization, Modernization, Local Political Actors, Islamic Politics.

Abstrak:

Dinamika politik Islam di era globalisasi semakin relevan seiring perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang mendunia. Globalisasi memengaruhi praktik politik Islam di tingkat lokal dan global, terutama melalui penetrasi teknologi dan pertukaran ideologi. Artikel ini menganalisis dampak globalisasi terhadap perkembangan politik Islam di Indonesia pasca-2016, termasuk tantangan polarisasi moderasi-radikalisme dan respons aktor politik domestik. Metode penelitian menggunakan studi literatur kualitatif dengan sumber jurnal, buku, dan laporan terkini (2018–2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi mempercepat pertukaran nilai Islam-Barat, memicu polarisasi antara modernisasi dan konservatisme. Di satu sisi, globalisasi mendorong integrasi antarbudaya; di sisi lain, memicu resistensi untuk mempertahankan identitas keislaman. Artikel ini juga mengkaji respons strategis aktor politik Islam, seperti partai politik dan gerakan sosial, dalam menghadapi tantangan tersebut—mulai dari adaptasi hingga penolakan. Kontribusi orisinal artikel terletak pada analisis fenomena kontemporer seperti Gerakan 212 dan kebijakan deradikalisasi pemerintah pasca-

pembubaran HTI (2017). Simpulan artikel menegaskan bahwa interaksi kompleks antara tradisi dan modernitas dalam politik Islam Indonesia memerlukan pendekatan kebijakan yang kontekstual, inklusif, dan berbasis pemahaman lokal-global.

Kata Kunci: *Globalisasi, Modernisasi, Aktor Politik Lokal, Politik Islam.*

PENDAHULUAN

Hubungan antara Islam dan politik telah menjadi objek kajian sejak masa klasik dan tetap relevan hingga saat ini. Dalam Muqaddimah, Ibn Khaldun mengajukan teori tentang pentingnya solidaritas sosial (*asabiyyah*) dalam membangun negara yang stabil dan kuat, di mana agama memainkan peran sentral dalam membentuk struktur sosial dan politik masyarakat. Khaldun menunjukkan bahwa interaksi antara agama dan kekuasaan membentuk fondasi legitimasi politik yang vital bagi stabilitas suatu negara¹. Pandangan ini mengarahkan kita pada pemahaman bahwa politik Islam, meskipun memiliki dimensi yang beragam, tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama yang mengaturnya.

Sejak awal, hubungan antara Islam dan politik sudah terjalin erat, dan hal ini terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Namun, pada masa kolonial, hubungan ini mengalami proses marginalisasi, di mana politik Islam sengaja dipinggirkan melalui kebijakan *divide et impera* yang diterapkan oleh penjajah Belanda. Meski demikian, organisasi-organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang lahir pada awal abad ke-20, berhasil mengisi ruang sosial-keagamaan dalam kehidupan bangsa, menjadikan mereka sebagai pilar utama dalam menjaga moderasi Islam di Indonesia pascakolonial².

Dalam konteks modern, hubungan antara Islam dan politik semakin kompleks, terutama setelah gelombang revolusi Arab yang membawa isu-isu demokrasi dan pemerintahan berbasis Islam ke panggung global. John L. Esposito, dalam bukunya *Islam and Democracy after the Arab Spring*, memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana Islam berperan dalam proses demokratisasi di negara-negara Muslim. Esposito menyoroti tantangan besar dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam sistem demokrasi, sebuah masalah yang relevan di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia³. Globalisasi telah mempercepat pertukaran ideologi dan memperluas ruang untuk diskursus politik Islam yang lebih inklusif dan plural.

Di Indonesia, globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika politik Islam. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, globalisasi memberikan kemudahan bagi penyebaran ideologi dan nilai-nilai politik Islam, baik yang moderat maupun radikal. Dalam *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, Greg Fealy dan Sally White mengkaji dampak globalisasi terhadap ekspresi keagamaan dan politik Islam di Indonesia, termasuk fenomena komodifikasi agama dan peran media sosial yang semakin dominan dalam membentuk wacana politik Islam⁴. Perkembangan ini menciptakan ruang bagi gerakan Islam

¹ Ibn Khaldun, *The Muqaddimah – An Introduction to History* (F. Rosenthal Trans.), 1967, [https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/The Muqaddimah ? An Introduction to History by Ibn Khaldun.pdf](https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/The_Muqaddimah_?_An_Introduction_to_History_by_Ibn_Khaldun.pdf).

² M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c. 1300, A History of Modern Indonesia since c. 1300*, 1993, <https://doi.org/10.1007/978-1-349-22700-6>.

³ John L. Esposito et al., "Islam and Democracy after the Arab Spring," *AJIS: American Journal of Islam and Society* 13, no. 50 (2016): 131–35, <https://doi.org/10.35632/ajis.v36i1.860>.

⁴ Greg Fealy and Sally White, *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008).

transnasional untuk mempengaruhi politik Indonesia, namun juga memberikan tantangan terhadap upaya menjaga moderasi dalam beragama.

Vedi R. Hadiz, dalam artikelnya *Indonesia's Missing Left and the Islamisation of Dissent*, mengemukakan bahwa polarisasi antara Islam moderat dan radikal di Indonesia semakin tajam, terutama dalam konteks globalisasi yang membawa ideologi-ideologi dari luar. Hadiz menekankan bagaimana identitas agama digunakan dalam mobilisasi politik untuk memperkuat kekuatan tertentu di dalam negara, sementara kelompok lainnya merasa terpinggirkan. Dalam hal ini, Indonesia menghadapi dilema besar dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan tantangan dari ideologi yang tidak sesuai dengan konteks lokal⁵.

Fenomena politik Islam di Indonesia, seperti Gerakan 212, semakin menggambarkan bagaimana identitas Islam dimobilisasi untuk tujuan politik. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada pembelaan terhadap agama, tetapi juga mencerminkan ketidakpuasan terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia. Arif dan Wardhani (2022) dalam studi mereka tentang Gerakan 212, menunjukkan bagaimana media internasional mengkonstruksi fenomena ini dalam kerangka politik identitas Islam dan populisme. Mereka menekankan bagaimana media internasional, seperti yang dilakukan oleh agensi berita besar, memberikan framing terhadap gerakan ini yang dapat mempengaruhi persepsi global terhadap politik Islam Indonesia. Gerakan ini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial dan merupakan salah satu contoh utama bagaimana politik identitas dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu⁶.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik Islam di Indonesia dalam konteks globalisasi dengan fokus pada tantangan polarisasi moderasi dan radikalisasi. Globalisasi yang mempertemukan berbagai ideologi dapat memperburuk perpecahan, namun juga memberikan peluang untuk integrasi dan inovasi politik. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana globalisasi memengaruhi dinamika politik Islam di Indonesia, serta strategi yang dapat diambil untuk mengelola tantangan tersebut dalam kerangka demokrasi Pancasila yang inklusif dan adaptif. Dalam pembahasan ini, akan ditelaah pula bagaimana aktor-aktor politik Islam domestik, baik partai politik maupun gerakan sosial, merespons tantangan globalisasi dan membentuk arah politik Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis dinamika politik Islam di Indonesia dalam konteks globalisasi. Metode studi literatur dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menginterpretasikan informasi yang relevan yang diperoleh dari berbagai sumber teks akademik, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan terkait. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya dalam menggambarkan hubungan antara politik Islam dan globalisasi di Indonesia.

⁵ Vedi R. Hadiz, "Indonesia's Missing Left and the Islamisation of Dissent," *Third World Quarterly* 42, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.1080/01436597.2020.1768064>.

⁶ Muhammad Arif and Evi Wardhani, "Indonesian Islamic Populism and Global Framing: A Content Analysis of the 212 Demonstration by the Greatpowers' News Agencies," *The Journal of Society and Media* 6 (March 25, 2023): 486–507, <https://doi.org/10.26740/jsm.v6n2.p486-507>.

Pencarian literatur dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan database akademik terpercaya, seperti Google Scholar, JSTOR, dan repository lainnya. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian mencakup istilah-istilah seperti "politik Islam", "globalisasi", "deradikalisasi", "polarisasi moderasi-radikalisme", dan "politik identitas". Selain itu, referensi dari sumber yang telah ditemukan juga ditelusuri untuk memperluas cakupan literatur dan memperkaya analisis.

Analisis literatur dilakukan dengan pendekatan induktif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi tren, pola, dan perbedaan dalam teori serta praktik politik Islam yang terjadi di Indonesia, khususnya terkait dengan pengaruh globalisasi. Hasil dari analisis ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana aktor-aktor politik Islam di Indonesia merespons tantangan yang muncul akibat globalisasi, serta bagaimana respons ini membentuk arah politik Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polaritas Moderasi-Radikalisme dalam Politik Islam Indonesia

Dinamika politik Islam di Indonesia pasca-2016 menunjukkan adanya polarisasi tajam antara kelompok moderat dan radikal, yang semakin mencolok dalam konteks globalisasi yang mempengaruhi dinamika sosial dan politik di tanah air. Organisasi-organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah berpegang pada prinsip Islam Wasathiyah, yang menekankan moderasi, toleransi, dan dialog antaragama. Kedua organisasi ini tidak hanya menegaskan kesesuaian ajaran Islam dengan Pancasila, tetapi juga memperjuangkan Islam yang inklusif dan terbuka untuk perbedaan. Mereka berperan dalam menjaga stabilitas sosial Indonesia dengan menekankan pentingnya toleransi dan pluralisme dalam masyarakat beragama⁷. Pendekatan mereka berusaha menjaga kedamaian sosial dalam kerangka negara demokratis.

Namun, di sisi lain, gerakan-gerakan transnasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) menunjukkan adanya kecenderungan radikal yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan narasi eksklusivisme keagamaan dan anti-pluralisme. Fenomena ini semakin menguat seiring dengan penetrasi media sosial yang memungkinkan penyebaran pesan-pesan radikal dengan cepat, menjangkau audiens yang lebih luas. Fealy & White, 2008 mencatat bahwa melalui platform-platform seperti Telegram, Twitter, dan Facebook, kelompok-kelompok ini menyebarkan ideologi mereka kepada pemuda perkotaan yang rentan terhadap ajakan-ajakan ekstrem⁸. Hal ini memperlihatkan bagaimana globalisasi, melalui teknologi digital, tidak hanya mempercepat pertukaran ide, tetapi juga memperdalam fragmentasi sosial yang dapat memicu ketegangan antar kelompok yang berbeda pandangan.

Fenomena Gerakan 212 (2016-2019) menjadi contoh nyata bagaimana identitas Islam dimobilisasi untuk tujuan politik. Gerakan ini, yang awalnya berfokus pada protes terhadap Ahok, gubernur non-Muslim Jakarta, kemudian berkembang menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial dan marginalisasi ekonomi. Gerakan ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap sistem yang ada dan memanfaatkan sentimen agama untuk menarik

⁷ Nur Kholis et al., *Islam Indonesia 2020* (Yogyakarta: UII Press, 2020), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/25046>.

⁸ Fealy and White, *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*.

dukungan dari kelompok mayoritas Muslim⁹. Mietzner (2022) menunjukkan bahwa elite politik lokal memanfaatkan gerakan ini untuk mencapai tujuan politik mereka, memobilisasi massa dengan sentimen agama yang kuat, yang menunjukkan adanya pertarungan antara kepentingan politik yang lebih luas dan kepentingan agama¹⁰.

Sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian oleh Gani et al. (2024), gerakan ini tidak hanya berpusat pada masalah agama tetapi juga mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia, terutama di kalangan kelompok Muslim yang merasa terpinggirkan dalam struktur sosial dan ekonomi negara¹¹. Selain itu, gerakan ini memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk memperkuat narasi radikal dan mobilisasi massa, yang pada gilirannya meningkatkan polarisasi dalam masyarakat (Nasri & Khairi, 2023). Kekuatan media sosial dalam memperkuat pesan-pesan politik berbasis identitas agama sangat jelas terlihat dalam kesuksesan mobilisasi yang menggerakkan jutaan orang ke jalanan¹².

Globalisasi dan Dilema Kebijakan Deradikalisasi

Kebijakan deradikalisasi pemerintah Indonesia, seperti pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 2017 dan penerapan Perpres No. 7/2021, merupakan respons terhadap tekanan internasional untuk memerangi ekstremisme. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menanggulangi ancaman radikalisme, yang semakin diperburuk dengan globalisasi dan penyebaran ideologi melalui internet. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena dianggap represif dan tidak menyentuh akar masalah radikalisme yang lebih dalam, seperti kemiskinan struktural, ketidakadilan sosial, dan marginalisasi politik yang terjadi di kalangan kelompok tertentu di masyarakat¹³.

Studi kasus di Aceh, yang menerapkan Perda Syariah, menunjukkan bahwa kebijakan deradikalisasi yang berfokus pada kontrol agama justru memperburuk stigma terhadap perempuan dan minoritas. Penerapan Perda Syariah mengarah pada pembatasan hak-hak dasar dan kebebasan individu, meskipun dipresentasikan sebagai bentuk “formalisme hukum Islam” yang sesuai dengan nilai agama¹⁴. Dalam hal ini, kebijakan deradikalisasi seringkali lebih berfokus pada pendekatan yang berbasis pada kontrol politik dan keamanan daripada penyelesaian masalah sosial yang mendalam, yang membuat kebijakan tersebut menjadi tidak efektif dalam menanggulangi akar radikalisme.

Indonesia menghadapi paradoks dalam upaya deradikalisasi. Di satu sisi, negara ini kerap dipuji sebagai model demokrasi Muslim moderat yang menjunjung pluralisme, terutama melalui komitmen pada Pancasila sebagai fondasi inklusif¹⁵. Hefner (2011) menegaskan bahwa menyebut kelompok seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai representasi

⁹ Muhamad Ali et al., “Dinamisasi Politik Identitas Di Indonesia (Studi Kasus : Mobilisasi Gerakan 212 Pada Pilkada DKI 2017),” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. December (2023): 108–18.

¹⁰ Marcus Mietzner, “Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials,” in *Democratic Regressions in Asia*, ed. Aurel Croissant and Jeffrey Haynes (London: Routledge, 2022), 18.

¹¹ Abdul Gani, Abdul Fattah, and Ulyan Nasri, “Social Media and Radicalization: The Latest Threat to Religious Moderation,” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 1 (2024): 141–47, <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1869>.

¹² Ulyan Nasri et al., “Understanding of Santri Regarding Quranic Verses as Prayers within Hizib Nahdlatul Wathan and Its Implications for Children’s Education in Daily Life,” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 8, no. 3 (2023): 1600–1604, <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1568>.

¹³ Hadiz, “Indonesia’s Missing Left and the Islamisation of Dissent.”

¹⁴ Zainal Abidin et al., *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*, 2011.

¹⁵ Luthfi Assyaukanie, “Akar-Akar Legal Intoleransi Dan Diskriminasi Di Indonesia,” *Maarif* 13, no. 2 (2018): 27–42, <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.20>.

"*Civil Islam*"—gagasan yang menghubungkan etos keagamaan dengan nilai-nilai modern dan demokratis. Namun, dokumen juga mengingatkan bahwa kedua organisasi ini tidak sepenuhnya lepas dari kecenderungan konservatif, terutama dalam merespons tekanan politik identitas pasca-Reformasi¹⁶.

Di sisi lain, Indonesia terjebak dalam paradoks kebijakan deradikalisasi. Meski memiliki instrumen seperti Pancasila, konstitusi dan UU justru menjadi akar legal intoleransi. Contoh nyata adalah UU Penodaan Agama (No. 1/PNPS/1965) yang kerap dikriminalisasi untuk membungkam minoritas, seperti kasus Ahok pada 2016-2017. Di tingkat lokal, studi dalam dokumen ini menyoroti peran pondok pesantren sebagai benteng moderasi, tetapi praktiknya sering terkendala oleh kebijakan pemerintah yang ambigu. Misalnya, aturan SKB 2006 tentang rumah ibadah justru mempersulit minoritas membangun tempat ibadah, memperkuat ketegangan antarumat¹⁷.

Adaptasi Partai Politik Islam dalam Pusaran Globalisasi

Partai politik Islam di Indonesia, terutama PKB dan PKS, menunjukkan dinamika yang menarik dalam menghadapi arus globalisasi yang semakin deras. Masing-masing partai berusaha menyesuaikan diri dengan tren global sambil tetap mempertahankan prinsip dasar mereka sebagai partai politik Islam. PKB, misalnya, mengusung nilai moderasi Islam (*wasathiyah*) yang relevan dengan isu global. Kampanye PKB tentang keberlanjutan lingkungan hidup sering kali dihubungkan dengan konsep *khalifah fil ardi* (pemimpin di bumi), yang mengajak umat Islam untuk menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab moral mereka. Ini adalah langkah progresif yang mencoba menjawab tantangan global dalam konteks Islam yang moderat¹⁸.

Disisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggunakan narasi politik identitas, seperti isu keagamaan, untuk menarik dukungan, termasuk dari pemilih muda. Menurut Warburton dan Aspinall (2019), PKS dan kelompok Islamis lainnya menggabungkan kritik terhadap elit politik dengan sentimen agama, seperti dalam Aksi Bela Islam 2016–2017 yang menargetkan Ahok. PKS juga sering menyoroti ketimpangan ekonomi dan ketergantungan pada kekuatan asing¹⁹. Contohnya, dalam pemilu 2019, koalisi Prabowo (termasuk PKS) menggunakan narasi tentang eksploitasi oleh "oligarki" dan asing untuk menarik suara. Dengan kata lain, selain fokus pada agama, kritik PKS terhadap sistem ekonomi neoliberal menjadi cara mereka merespons ketidakadilan sosial, yang juga berkaitan dengan analisis kemunduran demokrasi di Indonesia.

Namun, Partai-partai Islam di Indonesia menghadapi dilema saat merespons tuntutan globalisasi dalam kebijakan pendidikan. Contohnya, revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tahun 2023 gagal karena perdebatan sengit antara kelompok yang ingin melindungi madrasah (sekolah agama Islam) sebagai bagian penting dari identitas lokal, dengan kelompok yang menuntut transparansi pendanaan dan pencegahan radikalisme. Menurut penelitian Azwar dkk. (2024), partai seperti PKB mendukung madrasah karena dianggap bagian dari hak pendidikan, tetapi draf revisi UU justru menghapus kata "madrasah", sehingga organisasi Islam

¹⁶ Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*, 2011, <https://doi.org/10.2307/3557788>.

¹⁷ Bella Widya, "Deradicalization in Indonesia : Implementation and Challenge," *Journal of Terrorism Studies* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.7454/jts.v2i1.1016>; Assyaukanie, "Akar-Akar Legal Intoleransi Dan Diskriminasi Di Indonesia."

¹⁸ Kholis et al., *Islam Indonesia 2020*.

¹⁹ Eve Warburton and Edward Aspinall, "Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion," *Contemporary Southeast Asia* 41, no. 2 (2019): 255–85, <https://doi.org/10.1355/cs41-2k>.

besar seperti NU dan Muhammadiyah menolak karena khawatir identitas agama terabaikan. Sementara itu, di parlemen, banyak partai Islam (seperti PKS, PAN, PPP) ikut menolak revisi karena dianggap tidak adil, meski sebagian juga khawatir otonomi madrasah bisa menyulitkan pengawasan dana dan kualitas pendidikan. Akibatnya, kegagalan revisi ini berisiko memperlebar kesenjangan pendidikan antara sekolah umum dan madrasah, serta menghambat pembaruan kurikulum yang sesuai kebutuhan zaman. Singkatnya, partai Islam terjebak antara mempertahankan nilai lokal atau mengikuti tuntutan global, sambil berusaha tetap relevan di tengah politik yang semakin terpecah²⁰.

Media Digital sebagai Arena Kontestasi

Media sosial dan platform digital telah menjadi arena utama dalam pertarungan ideologi antara kelompok moderat dan radikal. Dengan penetrasi teknologi yang semakin tinggi, media sosial menawarkan ruang bagi berbagai kelompok untuk menyebarkan ideologi mereka, baik yang moderat maupun yang ekstrem. Hashtag seperti #IndonesiaTanpaJIL yang digunakan oleh kelompok konservatif menjadi contoh bagaimana media sosial digunakan untuk menyerang kelompok yang dianggap mengancam nilai-nilai tradisional. Kelompok ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan anti-liberal, anti-sekularisme, dan mengkritik kelompok-kelompok yang mereka anggap merusak nilai-nilai Islam yang otentik²¹.

Sementara itu, kelompok moderat, seperti NU, memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan nilai-nilai Islam yang inklusif dan toleran. Media digital yang diusung oleh NU menjadi simbol dari perjuangan untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam Islam. NU berusaha mengubah persepsi bahwa Islam adalah agama yang eksklusif dan diskriminatif terhadap perempuan. Dengan menggunakan media sosial sebagai platform, NU dapat menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk kalangan muda, untuk membangun narasi tentang Islam yang ramah, moderat, dan inklusif. Salah satu contoh konkret adalah buku berjudul *Panggung Ulama Perempuan NU di Media Digital* karya Anifatul Jannah. Buku ini mengangkat peran ulama perempuan NU dalam memanfaatkan media digital untuk dakwah, termasuk dalam isu-isu fiqh perempuan dan pemberdayaan perempuan melalui platform digital²².

Misalnya lagi, tokoh seperti Ning Firda Lirboyo aktif berdakwah melalui Instagram, menjawab pertanyaan seputar fiqh perempuan, dan memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam diskusi keagamaan secara aktif. Fenomena ini memperkuat teori Manuel Castells mengenai *network society* (2018), di mana jaringan digital berfungsi sebagai pusat kekuasaan baru yang menggeser peran tradisional negara dalam mengendalikan wacana publik. Dalam konteks ini, siapa yang menguasai ruang maya memiliki kekuatan besar untuk menentukan narasi sosial dan politik. Castells (2018) berargumen bahwa kekuasaan kini lebih terdistribusi di luar negara dan berpindah ke aktor non-negara yang dapat memanfaatkan ruang digital untuk mempengaruhi opini publik dan kebijakan negara²³.

²⁰ Boyke Azwar et al., "Political Review of the Failure of the Revision of Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional in 2023 and Its Impact on Education in Indonesia," *Inovasi Kurikulum* 21, no. 4 (2024): 1847–60.

²¹ Aptiani Nur Jannah, "Konservatisme Agama Di Medsos, MERIT: Ada Andil Politik," website, 2020, <https://ppim.uinjkt.ac.id/2020/11/28/konservatisme-agama-di-medsos-merit-ada-andil-politik/?utm;> M H Effendy, A N Efendi, and ..., "Media Sosial Sebagai Platform Penyampaian Ideologi Keagamaan," *Proceedings of the 3rd International Conference on Islamic Studies (ICONIS) 2019*, 2019, 1–16.

²² Anifatul Jannah, *Panggung Baru Ulama Perempuan NU Di Media Digital* (Yogyakarta: Dawuh Guru, 2023).

²³ M Castells, *The Information Society Reader (1st Ed.)*, ed. Raimo Blom et al. (London: Routledge, 2020).

Namun, fenomena ini juga menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah dan lembaga sosial dalam mengatur dan mengendalikan narasi-narasi yang berkembang di ruang digital. Media sosial memberikan kemudahan untuk menyebarkan informasi dan membentuk opini, tetapi juga menjadi sarana bagi kelompok radikal untuk mengorganisir dan merekrut anggota baru. Hal ini memperlihatkan bahwa, meskipun pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan pengawasan dan pembatasan akses terhadap konten berbahaya, peran media sosial dalam memperburuk polarisasi dan radikalisasi tetap menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi²⁴.

Peran media sosial ini semakin mempertegas bagaimana globalisasi, melalui penetrasi teknologi dan informasi, telah mengubah lanskap politik Islam di Indonesia. Ruang digital tidak hanya menjadi tempat untuk diskusi atau pertukaran ide, tetapi juga menjadi medan pertempuran untuk memenangkan wacana politik dan ideologi. Dalam konteks ini, kontrol atas media sosial tidak hanya memberikan kekuatan politik, tetapi juga mempengaruhi arah kebijakan sosial budaya yang berkembang di Indonesia.

KESIMPULAN

Dinamika politik Islam di Indonesia di era globalisasi ditandai oleh interaksi kompleks antara tradisi dan modernitas, dipercepat oleh penetrasi teknologi dan pertukaran ideologi transnasional. Globalisasi memicu polarisasi antara kelompok moderat (seperti NU dan Muhammadiyah) yang mempromosikan Islam *wasathiyah* selaras dengan Pancasila, dengan kelompok radikal (seperti HTI dan FPI) yang memanfaatkan media digital untuk menyebarkan narasi eksklusivisme. Fenomena Gerakan 212 (2016–2019) menjadi contoh nyata mobilisasi identitas Islam, menggambarkan bagaimana sentimen agama dimanfaatkan untuk kepentingan politik sekaligus merefleksikan ketidakpuasan terhadap ketimpangan sosial-ekonomi.

Kebijakan deradikalisasi pemerintah, seperti pembubaran HTI (2017), dinilai represif dan gagal menyentuh akar masalah struktural seperti kemiskinan dan marginalisasi. Studi kasus Aceh menunjukkan formalisme hukum Islam melalui Perda Syariah justru memperburuk diskriminasi terhadap perempuan dan minoritas. Partai politik Islam seperti PKB dan PKS juga menghadapi dilema antara mempertahankan identitas lokal (misalnya pembelaan madrasah) dan merespons tuntutan global, seperti transparansi pendidikan. Kegagalan revisi UU Sisdiknas 2023 mempertegas risiko kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah umum dan madrasah.

Media digital menjadi arena pertarungan ideologi antara narasi anti-pluralisme kelompok konservatif dan Islam inklusif yang dipromosikan NU. Tantangan utamanya adalah menyeimbangkan pengawasan konten dengan kebebasan berekspresi. Celah penelitian mencakup efektivitas algoritma moderasi, dampak psiko-sosial narasi ekstrem pada generasi muda, serta peran platform alternatif (*podcast*) dalam melawan ekstremisme. Solusi strategis meliputi: dialog antar-kelompok, pemanfaatan media untuk toleransi, dan reformasi kebijakan deradikalisasi berbasis keadilan sosial. Riset lanjutan diperlukan untuk menguji kolaborasi pemerintah, platform digital, dan organisasi keagamaan dalam merancang kebijakan adaptif.

²⁴ Sara Zeiger and Joseph Gyte, "Prevention of Radicalization on Social Media and the Internet," in *Handbook of Terrorism Prevention and Preparedness*, vol. 1, 2021, 358–95.

REFERENSI

- Abidin, Zainal, Adzkar Ahsinin, Afridal Darmi, and Roichatul Aswidah. *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*, 2011.
- Ali, Muhamad, Vardan Aminudin, Mutiara Ayudia, Pratiwi Angelica, and Diahlaksmi Cahyowirawan. "Dinamisasi Politik Identitas Di Indonesia (Studi Kasus : Mobilisasi Gerakan 212 Pada Pilkada DKI 2017)." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. December (2023): 108–18.
- Arif, Muhammad, and Evi Wardhani. "Indonesian Islamic Populism and Global Framing: A Content Analysis of the 212 Demonstration by the Greatpowers' News Agencies." *The Journal of Society and Media* 6 (March 25, 2023): 486–507. <https://doi.org/10.26740/jsm.v6n2.p486-507>.
- Assyaukanie, Luthfi. "Akar-Akar Legal Intoleransi Dan Diskriminasi Di Indonesia." *Maarif* 13, no. 2 (2018): 27–42. <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.20>.
- Azwar, Boyke, Muhammad Sirozi, Sholihah Titin Sumanti, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Al Hikmah, Tanjung Balai, et al. "Political Review of the Failure of the Revision of Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional in 2023 and Its Impact on Education in Indonesia." *Inovasi Kurikulum* 21, no. 4 (2024): 1847–60.
- Castells, M. *The Information Society Reader (1st Ed.)*. Edited by Raimo Blom, Erkki Karvonen, Harri Melin, Kaarle Nordenstreng, Ensio Puoskari, Frank Webster, and Professor Frank Webster. London: Routledge, 2020.
- Effendy, M H, A N Efendi, and ... "Media Sosial Sebagai Platform Penyampaian Ideologi Keagamaan." *Proceedings of the 3rd International Conference on Islamic Studies (ICONIS) 2019*, 2019, 1–16.
- Esposito, John L., Tamara Sonn, John O. Voll, and Selim Öterbülül. "Islam and Democracy after the Arab Spring." *AJIS: American Journal of Islam and Society* 13, no. 50 (2016): 131–35. <https://doi.org/10.35632/ajis.v36i1.860>.
- Fealy, Greg, and Sally White. *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008.
- Gani, Abdul, Abdul Fattah, and Ulyan Nasri. "Social Media and Radicalization: The Latest Threat to Religious Moderation." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 1 (2024): 141–47. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1869>.
- Hadiz, Vedi R. "Indonesia's Missing Left and the Islamisation of Dissent." *Third World Quarterly* 42, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.1080/01436597.2020.1768064>.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*, 2011. <https://doi.org/10.2307/3557788>.
- Jannah, Anifatul. *Panggung Baru Ulama Perempuan NU Di Media Digital*. Yogyakarta: Dawuh Guru, 2023.
- Jannah, Aptiani Nur. "Konservatisme Agama Di Medsos, MERIT: Ada Andil Politik." website, 2020. <https://ppim.uinjkt.ac.id/2020/11/28/konservatisme-agama-di-medsos-merit-ada-andil-politik/?utm>.
- Khaldun, Ibn. *The Muqaddimah – An Introduction to History (F. Rosenthal Trans.)*, 1967. https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/The_Muqaddimah?_An_Introduction_to

History by Ibn Khaldun.pdf.

- Kholis, Nur, Azyumardi Azra, Noorhaidi Hasan, YUSDANI, Zuly Qodir, Alimatul Qibtyah, Krismono, Supriyanto, Ahmad Sadzali, and Hadza Min Fadhli Robby. *Islam Indonesia 2020*. Yogyakarta: UII Press, 2020. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/25046>.
- Mietzner, Marcus. "Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials." In *Democratic Regressions in Asia*, edited by Aurel Croissant and Jeffrey Haynes, 18. London: Routledge, 2022.
- Nasri, Ulyan, Parhul Khairi, Ahmad Syukri, and Masiyan Masiyan. "Understanding of Santri Regarding Quranic Verses as Prayers within Hizib Nahdlatul Wathan and Its Implications for Children's Education in Daily Life." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 8, no. 3 (2023): 1600–1604. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1568>.
- Ricklefs, M. C. *A History of Modern Indonesia since c. 1300. A History of Modern Indonesia since c. 1300*, 1993. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-22700-6>.
- Warburton, Eve, and Edward Aspinall. "Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion." *Contemporary Southeast Asia* 41, no. 2 (2019): 255–85. <https://doi.org/10.1355/cs41-2k>.
- Widya, Bella. "Deradicalization in Indonesia : Implementation and Challenge." *Journal of Terrorism Studies* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.7454/jts.v2i1.1016>.
- Zeiger, Sara, and Joseph Gyte. "Prevention of Radicalization on Social Media and the Internet." In *Handbook of Terrorism Prevention and Preparedness*, 1:358–95, 2021.